



PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM RANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN PRINGSEWU LAMPUNG

M. Paiton Abi Karomi*, Indarja, Amalia Diamantina

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : paitonabikaromi@gmail.com

Abstrak

Dalam menjalankan pembangunan, Indonesia tidak hanya menjalin kerjasama dengan negara-negara sahabat, namun juga memaksimalkan potensi dalam negeri. Indonesia untuk memaksimalkan potensi dalam negeri, pernah menerapkan sistem pembangunan yang berpusat pada pemerintah pusat (sentralistik). Sistem negara ini memiliki kelemahan dimana tidak mampu menciptakan ekonomi negara yang merata, mandiri, dan berdaya saing tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Pendapatan Daerah Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Pringsewu Lampung, Hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dalam rangka pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pringsewu Lampung, dan solusi yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah untuk mengatasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Pringsewu Lampung. Hasil Penelitian melakukan intensifikasi Pajak Daerah dengan melanjutkan dan memperbaiki program inovasi yang dilakukan serta menggali inovasi baru dalam intensifikasi Pajak Daerah, sehingga dapat mengurangi gap antara target dan potensi Pajak Daerah, mengoptimalkan pengelolaan kekayaan dan aset daerah, penataan ulang (restruksisasi aset), agar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif dan pada akhirnya akan mendatangkan Pendapatan Daerah melalui Retribusi Daerah atau Pendapatan Sewa;

Kata Kunci : Pemerintahan Daerah; Otonomi Daerah; Desentralisasi

Abstract

In carrying out development, Indonesia not only cooperates with friendly countries, but also maximizes domestic potential. Indonesia to maximize domestic potential, had implemented a development system that was centered on the central (centralistic) government. This state system has a weakness where it is unable to create a balanced, independent and highly competitive national economy. This research aims to analyze the Implementation of Duties and Authorities of Regional Revenue Agencies in the framework of Regional Financial Management in Lampung Pringsewu Regency, what obstacles are faced in carrying out the duties and authority in the framework of regional financial management in Lampung Pringsewu Regency, and the solutions made by the Regional Revenue Agency for overcome in the framework of Regional Financial Management in Lampung Pringsewu Regency. The results of the Research carry out intensification of Regional Taxes by continuing and improving the innovation program carried out as well as exploring new innovations in intensifying Regional Taxes, so as to reduce the gap between the target and potential of Regional Taxes, optimize the management of regional assets and assets, restructuring (asset restructuring), in order to used for productive activities and will ultimately bring Regional Revenue through Regional Retribution or Rental Income;

Keywords: Regional Government; Regional Autonomy; Decentralization

I. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan upaya perbaikan secara terencana menuju kehidupan yang lebih baik. Syaukanimemberikan konsep pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan manusia ini kepada tiga komponen utama; kelangsungan hidup (*life sustenance*), kehormatan diri (*self esteem*), dan kebebasan (*freedom*). Hal inilah yang ingin dicapai suatu negara dalam melakukan suatu pembangunan, tidak hanya kelangsungan hidup, namun juga mampu menampilkan kehormatan diri dan kebebasan dengan cara mengedepankan keotentikan, identitas diri, kemuliaan, dan adanya pengakuan. dalam negeri, pernah menerapkan sistem pembangunan yang berpusat pada pemerintah pusat (sentralistik). Sistem ini memiliki kelemahan dimana tidak mampu menciptakan ekonomi negara yang merata, mandiri, dan berdaya saing tinggi. Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pertumbuhan menuju paradigma penetapan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Paradigma sentralisasi saat ini telah berubah menjadi ke arah desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonom. Melalui asas desentralisasi, otonomi daerah hadir untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sendiri urusan pemerintahan dalam upaya meningkatkan kemandirian daerah. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan

perimbangan kewenangan pusat dan daerah yang diatur dalam satu paket Undang- Undang yaitu UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan tentang tanggungjawab politik dan Administratif Pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota dan Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan dasar hukum tentang desentralisasi fiskal, menjelaskan pembagaan baru mengenai sumber pemasukan dan transfer antar pemerintah. Otonomi daerah adalah hak wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

Peranan dan kontribusi Pendapatan yang kurang optimal seharusnya dapat disikapi oleh Kabupaten Pringsewu Lampung dengan lebih baik. Kabupaten Pringsewu melalui Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dinilai belum optimal menggali potensi Pendapatan Asli Daerah karena masih banyak sumber pendapatan yang belum tergarap seperti pajak hotel, pajak parkir dan retribusi jasa usaha. Cicilia, Indarja, Fitriana Wisnaeni, (2016) Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Medan. Hasil penelitian bahwa DPPKAD Kota Medan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah

daerah dalam bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Amalia Diamantina, (2017). Pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pengelolaan hasil perikanan di Kabupaten Pati bahwa Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pati mempunyai tugas kewenangan melaksanakan berbagai urusan perikanan, pembinaan dan pengembangan pengolahan hasil perikanan dan Kabupaten Pati. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan melakukan penelitian tentang Badan Pendapatan Daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten Pringsewu Lampung melalui pengelolaan keuangan daerah dalam penelitian yang berjudul

Rumusan masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas penulis akan merumuskan permasalahan dengan batas-batas sebagai berikut:

Bagaimanakah Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Pendapatan Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Pringsewu Lampung?

Hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Pringsewu Lampung?

Bagaimana Solusi yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah untuk mengatasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Pringsewu Lampung

Sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu bahwa pendapatan daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. (Penjelasan UU No.33 Tahun 2004).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.

A. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis normatif.

Untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur – literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan kepastasaan yang berpedoman pada peraturan – peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan penelitian ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Pendapatan Daerah dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Pringsewu Lampung.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti.

C. Sumber Data dan Jenis Data

Data yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang dipergunakan dalam menjawab

permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Data sekunder merupakan data utama yang digunakan dalam penulisan ini penulis dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) bahan hukum berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang berasal dari:
 1. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 3. Undang- Undang yaitu UU No. 23 Tahun 2014 tentang
 4. Pemerintah Daerah Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur- literature, buku-buku yang berkaitan dengan Wewenang Badan Pendapatan Daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen, mempelajari permasalahan dari buku-buku, literatur, aamakah dan kamus hukum dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan materi ditambah lagi dengan kegiatan pencarian data menggunakan internet.
- c. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada

pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran – penelusuran di internet.

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah cara mengumpulkan data dengan membaca, memahami dan mengutip, dan membuat catatan-catatan serta menganalisis peraturan perundang – undangan .

b. Studi Lapangan

Penelitian lapangan dimaksudkan memperoleh data primer yang dilakukan dengan metode wawancara secara langsung dengan narasumber/responden secara langsung dengan Kasubdin dan Kasubsi di Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Pringsewu Lampung.

2. Prosedur Pengolahan Data

Dalam pengolahan data penulis melakukan kegiatan sebagai berikut:

a. Seleksi Data

Seleksi data yaitu memilih data yang sesuai dengan objek yang akan dibahas dalam penelitian.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu pengelompokan data menjadi pokok bahasan sehingga sesuai dengan tujuan agar mudah menganalisis data yang akan ditentukan.

c. Sistematika Data

Yaitu data yang telah diklasifikasi kemudian ditempatkan dengan sesuai dengan posisi pokok permasalahan secara sistematis.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh, dianalisis secara metode kualitatif yaitu memaparkan kenyataan –kenyataan yang di dasarkan atas hasil penelitian. Dari analisis data tersebut, dilanjutkan dengan menarik kesimpulan metode induktif yaitu suatu cara berfikir khusus lalu kemudian diambil kesimpulan secara umum guna menjawab permasalahan yang diajukan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

Kabupaten Pringsewu

1. Letak Geografis Kabupaten Pringsewu

Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tanggamus, dan dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 48 tahun 2008 tanggal 26 November 2008 dan diresmikan pada tanggal 3 April 2009 oleh Menteri Dalam Negeri.

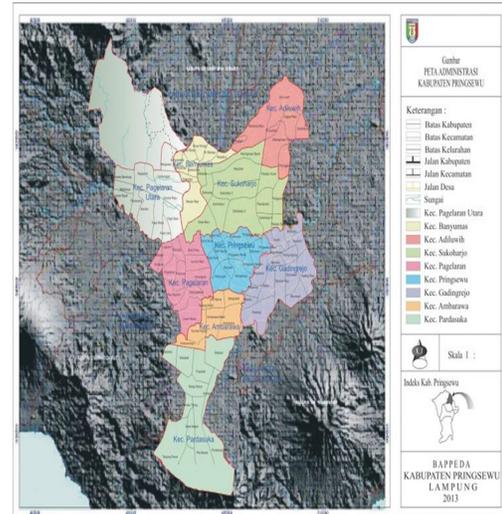
Secara geografis Kabupaten Pringsewu terletak diantara 104045'25" – 10508'42" Bujur Timur (BT) dan 508'10"- 5034'27" Lintang Selatan (LS), dengan luas wilayah dimiliki sekitar 625 km² atau 62.500 Ha. Secara administratif Kabupaten Pringsewu berbatasan

dengan 3 (tiga) wilayah kabupaten sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sendang Agung dan Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Sebelah Timur berbatasan Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Gedongtataan, Kecamatan Waylima dan Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bulok dan Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pugung dan Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus.

Kabupaten Pringsewu terdiri dari 9 (sembilan) wilayah kecamatan,

1. Kecamatan Pardasuka,
2. Kecamatan Ambarawa,
3. Kecamatan Pagelaran,
4. Kecamatan Pagelaran Utara,
5. Kecamatan Pringsewu,
6. Kecamatan Gading Rejo,
7. Kecamatan Sukoharjo,
8. Kecamatan Banyumas, dan
9. Kecamatan Adiluwih.



Gambar : Peta Administratif Kabupaten Pringsewu Lampung

Sekitar 41,79% wilayah Kabupaten Pringsewu merupakan areal datar (0-8%) yang tersebar di Kecamatan Pringsewu, Ambarawa, Gadingrejo dan Sukoharjo. Untuk lereng berombak (8-15%) memiliki sebaran luasan sekitar 19,09% yang dominan terdapat di Kecamatan Adiluwih. Sementara kelerengan yang terjal (>25%) memiliki sebaran luasan sekitar 21,49% terdapat di Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Pardasuka. Sebagian besar wilayah Kabupaten Pringsewu berada pada ketinggian 100–200 meter di atas permukaan laut, hal itu dapat dilihat dari porsi luasan yang merupakan luasan terbesar yaitu 40.555,25 Ha atau sebesar 64,88% dari total wilayah Kabupaten Pringsewu. Wilayah dengan ketinggian 100–200 meter sebagian besar tersebar di wilayah Kecamatan Pagelaran.

Sedangkan kelas ketinggian lahan tertinggi > 400 meter di atas permukaan laut dengan porsi luasan

terkecil atau sebesar 5,99% terdapat di Kecamatan Pardasuka dengan luasan sebesar 2.640,40 Ha atau 27,86% dari total luas wilayahnya dan Kecamatan Pagelaran dengan luasan sebesar 1.106,72 Ha atau 6,40% dari total luas wilayahnya.

Potensi formasi geologis terbesar di Kabupaten Pringsewu adalah formasi Lempung (Qtl) dengan luas sebesar 23.882 Ha atau sebesar 38,21%. Potensi formasi geologis terbesar kedua setelah Lempung (Qtl) di Kabupaten Pringsewu adalah formasi Kompleks Gunungkasih (Pzg) dengan luas sebesar 18.234 Ha atau sebesar 29,17%. Sedangkan potensi formasi geologis terkecil di Kabupaten Pringsewu adalah formasi Menanga (Km) dengan luas hanya sebesar 202 Ha atau hanya sebesar 0,32%. Jika dilihat dari persebaran group fisiografis di Kabupaten Pringsewu maka group fisiografis terluas adalah dataran dengan luas sebesar 16.496,88 Ha atau 26,39% dari total luas wilayah Kabupaten Pringsewu.

Group fisiografis dataran tersebut tersebar pada beberapa wilayah di Kabupaten Pringsewu. Porsi group fisiografis dataran terluas berada pada Kecamatan Adiluwih dengan luas sebesar 6.896,81 Ha atau sebesar 41,80% dari total luas dataran. Group fisiografis dengan luasan terkecil, yaitu group aneka bentuk dengan luas hanya sebesar 896,26 Ha atau 1,43% yang terletak di Kecamatan Pardasuka seluas 223,68 Ha atau sebesar 24,94% dari total luasan group fisiografis dan Kecamatan Pagelaran seluas 672,58 Ha atau sebesar 75,04% dari total luasan group fisiografis. Kabupaten

Pringsewu memiliki 8 (delapan) sungai dengan panjang dan luas daerah aliran yang bervariasi. Sungai terpanjang yang mengalir wilayah Kabupaten Pringsewu adalah Way Sekampung Bagian Tengah dengan panjang 24 Km.

Namun demikian walaupun Way Sekampung Bagian Tengah merupakan sungai terpanjang di Kabupaten Pringsewu, Way Sekampung Bagian Tengah hanya memiliki daerah aliran seluas 600 Km² atau lebih kecil jika dibandingkan dengan Sungai Way Wonokoro dan Way Apus. Way Wonokoro merupakan sungai terpanjang setelah Way Sekampung Bagian Tengah dengan panjang 8,8 Km dan daerah aliran terluas yaitu 7.040 Km².

Sedangkan sungai dengan panjang dan daerah aliran terkecil adalah sungai Marga Raharjo yaitu hanya seluas 15 Km² dengan panjang sungai hanya 2,5 Km. Kabupaten Pringsewu merupakan daerah tropis, dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 161,8 mm/bulan, dan rata-rata jumlah hari hujan 13,1 hari/bulan. Rata-rata temperatur suhu berselang antara 22,90C – 32,40C. Selang rata-rata kelembaban relatifnya adalah antara 56,8% sampai dengan 93,1%. Sedangkan rata-rata tekanan udara minimal dan maksimal di Kabupaten Pringsewu adalah 1008,1 Nbs dan 936,2 Nbs.

Dengan karakteristik iklim tersebut, wilayah ini berpotensi untuk dikembangkan sebagai daerah pertanian. Beberapa Jenis Tanah yang terdapat di Kabupaten Pringsewu adalah: Regosol, Gleisol, Kambisol dan Podsolik. Sedangkan

penggunaan lahan terbesar di Kabupaten Pringsewu adalah tegalan yaitu seluas 17.227 Ha atau sebesar 27,56%. Dari luas lahan yang digunakan untuk tegalan, 31,95% berada di Kecamatan Adiluwih. Sedangkan sisanya tersebar pada seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Pringsewu. Selain digunakan sebagai tegalan, sebagian besar wilayah Kabupaten Pringsewu juga digunakan sebagai lahan sawah, akan tetapi luasan lahan yang digunakan sebagai sawah tersebut masih berada dibawah lahan tegalan.

Luas lahan yang digunakan untuk sawah adalah seluas 12.197 Ha atau sebesar 19,51%, sedangkan sisanya digunakan sebagai lahan perkebunan seluas 55 11.989 Ha atau 19,18%, hutan seluas 10.634 Ha atau 17,01%, permukiman seluas 9.547 Ha atau 15,27%, dan belukar seluas 917 Ha atau 1,47%. 2. Kondisi Demografi Kabupaten Pringsewu Jumlah penduduk Kabupaten Pringsewu dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2007-2011) selalu mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2007 jumlah penduduk Kabupaten Pringsewu berjumlah 350.422 jiwa dan kemudian terus mengalami peningkatan hingga menjadi 384.252 jiwa pada tahun 2011 atau tumbuh sebesar 1,89%. Luas wilayah sebesar 625 km², kepadatan penduduk Kabupaten Pringsewu pada tahun 2011 sebesar 614,80 jiwa/Km², meningkat sebesar 5,33% dari tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan daerah kabupaten/kota lainnya di Provinsi Lampung maka kepadatan penduduk di Kabupaten Pringsewu relatif cukup tinggi

(peringkat ke-3 Provinsi Lampung), namun masih sangat jauh jika dibandingkan dengan Kota Bandar Lampung yang berada pada peringkat pertama dan Kota Metro pada peringkat kedua.

Ditinjau dari masing-masing kecamatan, Kecamatan Pringsewu merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk paling tinggi. Dengan luas wilayah sebesar 53,29 Km² kepadatan penduduk di Kecamatan Pringsewu hingga mencapai 1.415,07 jiwa/Km². Lima tahun kedepan penduduk Kabupaten Pringsewu semakin padat, mengacu pada hasil proyeksi pertumbuhan penduduk RPJPD Kabupaten Pringsewu 2005-2025 dengan asumsi pertumbuhan penduduk sebesar 1,89 % pertahun, diperkirakan pada tahun 2016 jumlah penduduk Kabupaten Pringsewu tumbuh menjadi sebesar 422.010 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 675,22 jiwa/Km².

Visidan Misi Kabupaten Pringsewu VISI : "Pringsewu Unggul, Dinamis dan Agamis"

Misi :

- a. Pembangunan sarana dan prasarana wilayah serta utilitas dasar sesuai dengan tata ruang wilayah.
- b. Meningkatkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan potensi daerah yang berwawasan lingkungan.
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing.
- d. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik dengan menerapkan kaidahkaidah "Good

Governance and Clean Government”.

- e. Membangun masyarakat religius, berbudaya, tentram dan harmonis. MOTTO : “BERSENYUM MANIS” yaitu Bersih, Sehat, Ekonomis, Nyaman Unggul, Maju Dan Mandiri, Serta Aman Dan Agamis

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

B1. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Pendapatan Daerah dalam Rangka Pengelola Keuangan Daerah di Kabupaten Pringsewu Lampung

Dasar pembentukan organisasi Badan Pendapatan Daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu, Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 44 Tahun 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan – badan Pemerintah.

Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- a. Perangkat Daerah Penghasil, POLRI dalam rangka peningkatan Pajak Daerah, pengelolaan serta pemanfaatan kekayaan milik daerah;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan sistem

administrasi perpajakan/retribusi yang jelas, dalam rangka pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui pemanfaatan teknologi informasi serta peningkatan kompetensi Aparatur pemungut Pajak/Retribusi Daerah; dan

- c. Mengoptimalkan pengelolaan BUMD, sebagai kepanjangan Pemerintah Daerah dalam penyediaan layanan publik, motor perekonomian dan sumber Pendapatan Daerah. Sedangkan kebijakan umum Pendapatan Daerah.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hambatan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu Kabupaten Lampung yaitu dengan caradengan mengoptimalkan pegawai yang bertugas di lapangan.

2. Solusi yang dilakukan Badan Pendapatan Dearah untuk mengatasi Pengelolaan Keuangan Dearah di Kabupaten Pringsewu Lampung. untuk mengatasi hambatan dalam peningkatan tugas dan wewenangnya adalah dengan mengintensifkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menggali potensi pendapatan daerah untuk dikembangkan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada.

B. Saran

Diharapkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu bisa melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Peraturan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.